

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Perencanaan

2.1.1. Definisi Perencanaan Ekonomi

Conyers dan Hills (dalam Arsyad, 1999: 112) mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses yang berkesinambungan dan mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang.

Berdasarkan definisi diatas maka ada empat elemen dasar perencanaan yaitu:

- a. Merencanakan berarti memilih. Menyiratkan antara perencanaan dengan proses pengambilan keputusan mempunyai hubungan yang sangat erat. Hubungan ini terutama berkaitan dengan faktor-faktor mempengaruhi pembuatan keputusan dan urutan tindakan di dalam proses pengambilan keputusan.
- b. Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumberdaya. Perencanaan mencakup proses pengambilan keputusan tentang bagaimana penggunaan sumberdaya yang tersedia dengan sebaik baiknya, sehingga kuantitas dan kualitas sumberdaya berpengaruh dalam memilih tindakan yang akan dilakukan.
- c. Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan. Konsep ini muncul sebagai akibat dari sifat dan proses penetapan tujuan dimana sering terjadi

tujuan didefinisikan secara kurang tegas akibat dari penetapan tujuan yang dilakukan orang lain.

- d. Perencanaan untuk masa depan. Tujuan dalam perencanaan dirancang untuk dicapai di masa yang akan datang, sehingga perencanaan berkaitan dengan masa depan.

Mohammad Hatta mendefinisikan perencanaan sebagai alat untuk mengadakan perekonomian nasional yang teratur, yang direncanakan tujuan dan jalannya. Sedangkan Widjojo Nitisastro berpendapat bahwa perencanaan pada dasarnya berkisar pada dua hal yaitu penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan kongkrit yang hendak dicapai dan pilihan-pilihan di antara cara-cara alternatif yang efisien secara nasional guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Arsyad, 1999: 14)

2.1.2. Fungsi Perencanaan Ekonomi

Agar dapat mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, maka harus dilihat terlebih dahulu fungsi dari perencanaan yaitu (Arsyad, 1999: 116):

- a. Dengan perencanaan diharapkan terdapat suatu pengarah dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan.
- b. Dengan perencanaan dapat dilakukan suatu perkiraan potensi, prospek perkembangan, hambatan serta resiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang.
- c. Perencanaan memberikan kesempatan untuk menentukan pilihan yang terbaik.
- d. Dengan perencanaan maka dapat dipilih penyusunan skala prioritas dari pentingnya suatu tujuan.

- e. Perencanaan dapat dipakai sebagai alat mengukur atau untuk mengadakan evaluasi.

2.1.3. Ciri-ciri Perencanaan Ekonomi.

Perencanaan ekonomi memiliki ciri-ciri sebagai berikut (Arsyad, 1999: 115):

- a. Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang mantap, yang tercermin dalam usaha pertumbuhan ekonomi yang positif.
- b. Usaha yang tercermin dalam rencana untuk meningkatkan pendapatan perkapita.
- c. Usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi atau sering disebut sebagai usaha diversifikasi ekonomi.
- d. Usaha perluasan kesempatan kerja.
- e. Usaha pemerataan pembangunan.
- f. Usaha pembinaan lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan pembangunan.
- g. Usaha secara terus menerus untuk menjaga stabilitas ekonomi.

2.1.4. Unsur- unsur Pokok Perencanaan Ekonomi

Setiap perencanaan ekonomi harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut (Arsyad,1999: 115):

- a. Kebijakan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan.
- b. Adanya kerangka rencana makro.
- c. Perkiraan sumber-sumber pembiayaan pembangunan.
- d. Uraian kerangka kebijaksanaan yang konsisten.
- e. Penyusunan program investasi secara sektoral.
- f. Administrasi pembangunan yang mendukung.

2.2. Pembangunan Ekonomi

2.2.1. Definisi dan Pengertian Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakat. Pada umumnya pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi mempunyai pengertian (Arsyad, 1999: 12):

- a. Suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi secara terus menerus.
- b. Usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita.
- c. Kenaikan pendapatan perkapita harus terus berlangsung dalam jangka panjang.
- d. Perbaikan sistem kelembagaan di segala bidang.

2.2.2. Tujuan Pembangunan Ekonomi

Tujuan pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut (Todaro, 1999: 144):

- a. Untuk meningkatkan ketersediaan dan memperluas penyebaran barang-barang kebutuhan pokok seperti bahan makanan, tempat tinggal, sarana kesehatan dan perlindungan keamanan bagi semua masyarakat.
- b. Untuk meningkatkan taraf hidup yang meliputi pendapatan tertinggi, tersedianya lapangan kerja yang lebih banyak, sarana pendidikan yang lebih

baik dan perhatian yang besar terhadap pelestarian nilai-nilai budaya dan kemanusiaan.

- c. Untuk memperluas pilihan ragam ekonomi dan sosial bagi masing-masing negara atau bangsa yang bersangkutan melalui usaha untuk memerdekakan diri dari perbudakan ketergantungan pihak lain.

2.2.3. Tahap-tahap pembangunan Ekonomi

Menurut W.W. Rostow, proses pembangunan ekonomi dibedakan menjadi lima tahap yaitu (Arsyad, 1999: 47-54):

1. Masyarakat tradisional

Pada tahap ini terlihat masyarakatnya memiliki faktor produksi terbatas yang ditandai oleh cara produksi yang relatif masih primitif, dan cara hidup masyarakat yang masih dipengaruhi oleh nilai-nilai kurang rasional. Tingkat produktivitas pekerja masih rendah serta struktur sosialnya bersifat hirarkis, yaitu mobilitas vertikal anggota masyarakat dalam struktur sosial kemungkinannya kecil.

2. Prasyarat tinggal landas

Pada tahap ini masyarakat mempersiapkan dirinya untuk mencapai pertumbuhan atas kekuatannya sendiri. Terlihat adanya dua corak yaitu perubahan dicapai dengan perombakan masyarakat tradisional yang sudah lama ada dan perubahan tanpa perombakan sistem masyarakat tradisional.

3. Tinggal Landas

Pada awal tahap ini terjadi perubahan yang drastis dalam masyarakat seperti revolusi politik, terciptanya kemajuan yang pesat dalam inovasi, atau

terbukanya pasar baru sehingga terjadi peningkatan investasi. Rostow mengemukakan tiga ciri utama dari negara yang sudah mencapai masa tinggal landas, yaitu :

- a. Terjadinya kenaikan investasi produktif dari 5 persen atau kurang menjadi 10 persen dari produk nasional bersih.
 - b. Terjadinya perkembangan satu atau beberapa sektor industri dengan tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi.
 - c. Terciptanya suatu kerangka dasar politik, sosial dan kelembagaan yang bisa menciptakan perkembangan sektor modern dan eksternalitas ekonomi dan bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang terus terjadi.
4. Menuju kedewasaan

Suatu keadaan dimana masyarakat sudah secara efektif menggunakan teknologi modern pada hampir semua kegiatan produksi. Pada tahap ini sektor-sektor pemimpin lama yang akan mengalami kemunduran. Sektor-sektor pemimpin coraknya ditentukan oleh perkembangan teknologi, kekayaan alam, sifat dari tahap lepas landas serta kebijakan pemerintah.

5. Masa konsumsi tinggi

Pada masa ini, masyarakat lebih ditekankan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan konsumsi dan kesejahteraan, bukan lagi pada masalah produksi.

2.3. Pembangunan Ekonomi Daerah

2.3.1. Pengertian Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999: 298). Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah penekanan terhadap kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan.

2.3.2. Strategi Pembangunan Daerah

Agar tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat dicapai maka pelaksanaannya harus bertumpu pada strategi pembangunan daerah. Strategi pembangunan ekonomi daerah dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok besar (Arsyad, 1999: 310-313):

- a. Strategi pengembangan fisik atau lokalitas
- b. Strategi pengembangan sumber daya manusia
- c. Strategi pengembangan dunia usaha
- d. Strategi pengembangan masyarakat

Perencanaan dalam pembangunan ekonomi daerah mutlak diperlukan karena terdapat beberapa hal yang mempengaruhinya (Arsyad, 1999: 304):

a. *Spread effects*

Spread effects adalah suatu pengaruh yang menguntungkan karena adanya kegiatan ekonomi yang dilakukan daerah lain, misal bertambahnya kesempatan kerja bagi daerah sekitar akibat adanya perluasan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh daerah didekatnya.

b. *Back wash effects*

Back wash effects adalah dampak yang merugikan bagi masyarakat akibat adanya perluasan kegiatan ekonomi di suatu daerah, misalnya tingkat investasi yang semakin menurun di suatu daerah karena tingkat pendapatan yang diperoleh masyarakat.

c. *Trickling down effects*

Trickling down effects adalah imbas yang dirasakan oleh masyarakat akibat adanya perluasan kegiatan ekonomi di suatu daerah, misal adanya kegiatan atau pekerjaan baru bagi masyarakat sehingga dapat menambah pendapatan.

d. *Polarisation effects*

Polarisation effects adalah adanya perbedaan yang sangat mencolok antara suatu daerah dengan daerah lain yang disebabkan adanya konsentrasi kegiatan ekonomi di suatu wilayah.

Perencanaan pembangunan daerah juga memberikan beberapa manfaat antara lain (Sukirno, 1976: 116):

- a. Untuk membantu pemerintah pusat dalam meneliti proyek yang akan dilaksanakan di daerah tersebut

- b. Untuk menciptakan desentralisasi yang efektif untuk kemudian menciptakan administrasi yang lebih efektif.
- c. Untuk memberikan pengarahan kepada sektor swasta sehingga kegiatan investasi dapat dilakukan secara efisien dan dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pembangunan ekonomi.

Sedangkan menurut Blakely ada enam tahap dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah yaitu (Kuncoro,2004: 48): pengumpulan dan analisis data, pemilihan strategi pembangunan daerah, pemilihan proyek pembangunan, pembuatan rencana tindakan, penentuan rincian proyek, dan persiapan secara keseluruhan.

2.3.3. Tujuan Pembangunan Ekonomi Daerah

Tujuan dari pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah (Karjorejo,1999: 36) :

- a. Kemakmuran, dicerminkan dengan tingginya pendapatan masyarakat dengan batasan minimal untuk kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, serta papan.
- b. Keadilan, dicerminkan melalui distribusi pendapatan sesuai dengan kebutuhan, prestasi kerja, dan sesuai dengan jasanya.
- c. Kesejahteraan, dengan indikator kesempatan kerja dan cepatnya pertumbuhan pendapatan perkapita.

2.4. Konsep Daerah

Pengertian daerah berbeda-beda tergantung dari aspek tinjauannya, dari aspek ekonomi daerah memiliki pengertian (Aryad, 1999: 297-298):

a. Daerah Homogen

Daerah dipandang sebagai ruang dimana terjadi kegiatan ekonomi dengan sifat-sifat yang sama. Perbedaan internal serta interaksi di dalam wilayah itu dianggap tidak penting. Sifat-sifat yang sama antara lain : pendapatan perkapita, sosial budaya, dan geografis.

b. Daerah Modal

Suatu daerah dianggap sebagai ekonomi ruang yang dikuasai oleh suatu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi.

c. Daerah Perencanaan

Konsep daerah didasarkan atas ekonomi ruang yang berada di bawah satu administrasi tertentu, seperti satu propinsi, satu kabupaten, dan kecamatan.

2.5. Konsep Keunggulan Komparatif Daerah.

Pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan dari pembangunan suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat tergantung pada banyak atau tidaknya sektor-sektor ekonomi yang mempunyai potensi untuk dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan daerah. Sehingga sektor-sektor ekonomi yang mempunyai keunggulan komparatif perlu diperhatikan mengingat peranannya sebagai penentu pertumbuhan laju ekonomi suatu daerah. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk

menentukan sektor-sektor ekonomi mana yang mempunyai keunggulan komparatif adalah dengan menggunakan metode analisis *Location Quotient* (LQ). Keunggulan dari penggunaan metode ini adalah secara cepat dapat mengetahui sektor-sektor ekonomi yang menjadi sektor unggulan atau sektor basis komparatif.

2.6. **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

2.6.1. Konsep dan Definisi Produk Domestik Regional Bruto

Suatu daerah memerlukan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan dan gambaran secara menyeluruh tentang kondisi perekonomian daerah tersebut. Pendapatan regional adalah suatu penyajian berupa deretan angka yang digunakan sebagai indikator dalam mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi regional. Pertumbuhan ekonomi berdasarkan PDRB dapat dihitung dengan dua cara yaitu (Kuncoro, 2004: 84) : menggunakan PDRB riil (harga konstan) dan PDRB nominal (harga berlaku). Pertumbuhan ekonomi yang dihitung berdasarkan PDRB riil akan memberikan gambaran pertumbuhan output secara nyata.

Produk Domestik Regional Bruto didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, sedangkan pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita adalah Produk Domestik Regional Bruto yang dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut (Kuncoro,2004: 118).

2.6.2. Klasifikasi Lapangan Usaha Dalam PDRB

Klasifikasi lapangan usaha dalam PDRB dibagi menjadi sembilan kelompok (BPS,2004: 44) yaitu :

1. Sektor Pertanian

Sektor yang mencakup segala pengusahaan yang didapat dari alam dan merupakan benda atau barang biologis (hidup).

2. Sektor Pertambangan dan Penggalian

Sektor yang mencakup kegiatan penggalian, pengeboran, penyaringan, pencucian, pemilihan, dan pengambilan segala macam manfaat misalnya benda non migas, barang tambang, mineral dan barang galian yang tersedia di alam baik berupa benda padat, cair, maupun gas. Semua yang dilakukan ini sifat dan tujuannya untuk menciptakan nilai guna dari barang tambang dan galian sehingga memungkinkan untuk dimanfaatkan, dijual atau diproses lebih lanjut.

3. Sektor Industri Pengolahan

Sektor ini dibedakan menjadi dua sub sektor yaitu industri migas dan industri tanpa migas. Industri migas mencakup kegiatan pengolahan, pengilangan minyak bumi dan gas alam cair. Sedangkan industri tanpa migas mencakup industri besar, industri kecil, dan industri rumah tangga.

4. Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih

Sektor yang mencakup pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik, baik yang diselenggarakan oleh PLN maupun perusahaan non PLN, dengan tujuan untuk dijual. Sektor gas mencakup kegiatan penyediaan gas kota yang biasanya diusahakan oleh Perusahaan Gas Negara. Sedangkan sektor air bersih mencakup proses pembersihan, pemurnian dan proses kimiawi lainnya untuk menghasilkan air minum serta pendistribusian secara langsung melalui pipa dan alat lain ke rumah tangga, instansi pemerintah maupun swasta.

5. Sektor Bangunan

Sektor yang hasil akhirnya berupa bangunan atau konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat kedudukannya, baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana lainnya.

6. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

Sektor perdagangan meliputi kegiatan membeli dan menjual barang untuk tujuan penyaluran tanpa merubah sifat barang, meliputi kegiatan perdagangan besar dan eceran. Sektor restoran mencakup usaha penyediaan makanan dan minuman jadi yang pada umumnya dikonsumsi di tempat penjualan. Sektor hotel mencakup kegiatan penyediaan akomodasi yang menggunakan sebagian atau seluruh bangunan sebagai tempat penginapan.

7. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

Sektor transportasi meliputi kegiatan pemindahan penumpang dan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan alat angkut atau kendaraan, baik bermotor maupun tidak bermotor. Sektor komunikasi mencakup kegiatan pemberian jasa pada pihak lain dalam hal pengiriman

surat, wesel dan paket pos yang diusahakan oleh perum pos dan giro, serta pengiriman berita melalui telegram, telepon dan telex yang diusahakan oleh PT Telkom.

8. Sektor Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan.

Sektor ini secara umum meliputi kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan yang berupa penarikan dana dari masyarakat maupun penyalurannya kembali.

9. Sektor Jasa- jasa

Sektor ini meliputi kegiatan sektor jasa pemerintahan umum dan sektor swasta. Jasa pemerintahan umum meliputi administrasi pemerintahan dan jasa pemerintahan lainnya, sedangkan jasa swasta meliputi kegiatan sosial kemasyarakatan, hiburan dan rekreasi serta jasa perorangan dan rumah tangga.